

Transformasi Bahasa Indonesia: dari Lingua Franca ke Bahasa Nasional dalam Perspektif Historis

Transformation of The Indonesian Language: from Lingua Franca to National Language in A Historical Perspective

Nyoman Astawan^{a*}, I Nyoman Sadwika^b, I Ketut Muada^c

^{a,b,c} Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
Jalan Seroja, Tonja, Denpasar Utara

E-mail: nyoman.astawan@gmail.com*; nsadwika70@gmail.com; muadaketut@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini mengkaji evolusi Bahasa Indonesia dari akar Melayu sebagai lingua franca hingga berperan sebagai bahasa nasional dan simbol ideologis bangsa. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka, analisis mencakup fase prapenjjajaan, kolonial, peristiwa Sumpah Pemuda 1928, hingga kodifikasi serta pembakuan pascakemerdekaan. Tantangan kontemporer, seperti pengaruh bahasa asing, pergeseran bahasa daerah, dan disrupsi digital turut diidentifikasi. Hasil penelitian menunjukkan resiliensi Bahasa Indonesia serta merekomendasikan literasi digital, kebijakan linguistik adaptif, revitalisasi ruang publik, dan diplomasi global.

Kata kunci: Transformasi, Bahasa Indonesia, Lingua Franca, Bahasa Nasional, Historis

Abstract. This study examines the evolution of the Indonesian language from its Malay roots as a lingua franca to its role as a national language and ideological symbol of the nation. Employing a descriptive qualitative approach and literature review, the analysis covers the pre-colonial and colonial periods, the 1928 Youth Pledge, as well as codification and standardization in the post-independence era. Contemporary challenges such as foreign language influence, regional language shift, and digital disruption are also identified. Findings highlight the resilience of Indonesian and recommend digital literacy, adaptive linguistic policies, public space revitalization, and global linguistic diplomacy.

Keywords: Transformation, Indonesian Language, Lingua Franca, National Language, Historical.

PENDAHULUAN

Bahasa memainkan peran penting dalam membentuk jati diri dan identitas sebuah bangsa. Menurut Dewi bahasa adalah dasar dari identitas nasional yang mencerminkan warisan budaya dan sejarah suatu bangsa, serta bertindak sebagai alat pemersatu dalam masyarakat yang beragam (Dewi et al., 2023).

Bahasa tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi cermin dari budaya, nilai, dan sejarah bersama masyarakat yang menggunakan bahasa. Rumandang Bulan menegaskan bahwa selain berfungsi sebagai sarana komunikasi, bahasa juga menjadi identitas yang memiliki aspek sosiolinguistik dan budaya yang sangat kaya di Indonesia (Bulan, 2019).

Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara multikultural dan multietnis dengan lebih dari 700 bahasa daerah, pentingnya memiliki satu bahasa nasional yang mampu menggabungkan seluruh elemen masyarakat) menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak sejak awal pergerakan kebangsaan. Qanita dan rekan-rekan menunjukkan bahwa keragaman etnis dan bahasa di Indonesia mendorong para pemuda melafalkan Sumpah Pemuda sebagai upaya meningkatkan kesadaran kebangsaan dan mengembangkan kebutuhan akan satu bahasa persatuan (Elya Qanita et al., 2025). Selain itu, Santoso dkk., menjelaskan bahwa pengukuhan Bahasa Indonesia sejak Sumpah Pemuda berperan sebagai simbol persatuan dalam tengah keragaman (Santoso et al., 2023).

Bahasa Indonesia, yang diresmikan pada 28 Oktober 1928 melalui ikrar Sumpah Pemuda, telah menjadi simbol persatuan bangsa dalam perjuangan menuju kemerdekaan serta dalam proses pembangunan nasional. Dalam penelitiannya, Qanita et al. menyatakan bahwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, yang kemudian berperan dalam memperkuat identitas nasional selama masa kemerdekaan hingga era pembangunan (Elya Qanita et al., 2025). Selain itu, menurut Woring, Sumpah Pemuda menjadi awal dari pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam konteks

sejarah antara tahun 1928 hingga 1954 (Woring, 2022).

Pemilihan bahasa Melayu sebagai dasar Bahasa Indonesia bukanlah suatu keputusan yang muncul secara mendadak, melainkan hasil dari proses historis dan sosiolinguistik yang berlangsung lama dan rumit. Menurut Rizkiyani, perubahan Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia merupakan proses yang bertahap, yang dimulai sejak masa Kerajaan Sriwijaya dan berkembang melalui berbagai perubahan politik dan budaya hingga mencapai momen Sumpah Pemuda (Rizkiyani et al., 2025). Hal ini juga dikuatkan oleh analisis sejarah Adelaar dan rekan-rekannya mengenai asal-usul Proto Malaya serta perkembangan bahasa Melayu modern sebagai bahasa umum (*lingua franca*) di Asia Tenggara, yang menjadi dasar dalam pembentukan Bahasa Indonesia.

Bahasa Melayu sudah lama dikenal sebagai bahasa pengantar di wilayah kepulauan Nusantara. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7, bahasa ini digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pemerintahan, serta penyebaran agama, terutama agama Islam. Bahasa Melayu memiliki karakteristik yang sederhana secara morfologi, terbuka secara fonologis, serta fleksibel dalam menerima kosakata dari bahasa asing, sehingga membuatnya mudah dipelajari dan cepat menyebar di kalangan berbagai suku dan etnis (Hermansyah, 2014).

Selain itu, peran penting kerajaan-kerajaan Melayu seperti Malaka, Riau-Lingga, dan Johor sebagai pusat kekuasaan serta perdagangan membantu memperkuat kedudukan Bahasa Melayu di wilayah Asia Tenggara, terutama di daerah kepulauan Indonesia. Kerajaan Malaka pada abad ke-15 memperkuat pangsa pasar Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di wilayah pesisir Asia Tenggara. Bahasa ini kemudian dikembangkan oleh Kesultanan Johor dan Kesultanan Riau-Lingga sebagai pusat perdagangan, komunikasi ilmiah, serta administrasi, yang memperluas penyebaran Bahasa Melayu ke berbagai wilayah di Nusantara (Nordin, 2022).

Penerimaan Bahasa Melayu sebagai dasar Bahasa Indonesia menjadi lebih kuat karena dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, sosial, dan budaya. Menurut penelitian oleh Nataly, penggunaan Bahasa Melayu secara resmi pada masa kolonial tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki latar belakang politik dan sosial yang berkontribusi terbentuknya bahasa gerakan nasional (Nataly et al., 2024).

Di masa kolonial, Bahasa Melayu digunakan dalam berbagai media massa seperti surat kabar, juga diajarkan sebagai mata pelajaran utama di sekolah-sekolah yang dituju untuk pendidikan rakyat setempat, serta terdapat karya sastra populer yang ditulis dalam Bahasa Melayu. Hal ini membuat Bahasa Melayu cukup dikenal dan dekat dengan masyarakat umum. Penelitian mengenai media massa

kolonial mencatat banyak surat kabar yang terbit dalam Bahasa Melayu, seperti Medan Prijaji, Sinar Hindia, Oetoesan Melayu, dan Bintang Timor. Selain itu, pelajar pribumi diajarkan melalui Bahasa Melayu sebagai mata pelajaran utamanya, sehingga menjadikan Bahasa Melayu sangat familiar di kalangan masyarakat bumiputera.

Tidak seperti bahasa Belanda yang bersifat eksklusif dan hanya digunakan oleh kalangan elit kolonial, Bahasa Melayu berperan sebagai alat komunikasi yang lebih merata dan dekat dengan masyarakat umum. Dalam analisis terkait pers dan sistem pendidikan kolonial, terlihat bahwa pihak Belanda sengaja menghindari penggunaan bahasa Belanda dalam berkomunikasi sehari-hari dengan masyarakat lokal, dengan tujuan untuk mempertahankan struktur hierarki sosial yang ada. Sebaliknya, Bahasa Melayu berkembang menjadi alat komunikasi yang digunakan dalam pasar serta oleh masyarakat luas, sekaligus membantu membentuk kesadaran nasional yang bersifat kolektif (Habib F, 2017).

Proses peralihan dari Bahasa Melayu ke Bahasa Indonesia mencapai puncaknya pada Sumpah Pemuda tahun 1928, saat para pemuda menyatakan komitmen mereka untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak saat itu, bahasa ini mengalami proses kodifikasi dan standarisasi untuk memperkuat perannya sebagai bahasa resmi negara serta alat pendidikan nasional (Sudaryanto, 2018).

Anton Moeliono, seorang tokoh linguistik yang terkenal, berperan penting dalam memperjelas tata bahasa dan sistem ejaan Bahasa Indonesia. Upaya untuk mengkodifikasi bahasa ini dimulai sejak masa kolonial dengan sistem ejaan Van Ophuijsen dan Za'aba, hingga proses pembakuan modern yang terus memperkuat posisi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan alat pendidikan.

Penelitian mengenai perubahan Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, mengingat pentingnya pemahaman terhadap dinamika sejarah kebahasaan dalam konteks pembentukan identitas nasional. Menurut Nugraha dkk. proses transformasi Bahasa Melayu ke Bahasa Indonesia membuka wawasan tentang hubungan antar-etnis dan pemikiran ideologis dalam bidang bahasa—konteks ini sangat krusial dalam membentuk identitas nasional secara modern (Hariyawan Nugraha et al., 2025).

Sejarah bahasa tidak hanya menjelaskan perkembangan bentuknya secara linguistik, tetapi juga mencerminkan aspek kekuasaan, penentangan, integrasi, serta simbol-simbol ideologis. Menurut kajian Juanda dalam jurnal *Tuturan*, politik bahasa pada masa sebelum dan setelah kemerdekaan menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana kekuasaan dan simbol ideologis (Juanda, 2017). Sayangnya, masih banyak penelitian yang bersifat deskriptif dan hanya fokus

pada aspek linguistik formal, tanpa mempertimbangkan konteks historis dan sosiopolitik yang mendasarinya. Aisyah & Hartono melakukan studi semantik historis dan menunjukkan bahwa banyak penelitian hanya memfokuskan pada perubahan makna linguistik, tanpa memasukkan latar belakang sosial historis yang lebih dalam (Aisyah & Hartono, 2025).

Penelitian ini hadir untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan menggabungkan pendekatan historis dan linguistik dalam menganalisis peran Bahasa Melayu sebagai *lingua franca* serta proses perkembangannya menjadi Bahasa Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Alika Adelia dan tim (2025) menekankan pentingnya integrasi pendekatan historis dan linguistik dalam memahami bagaimana Bahasa Melayu diakui, dinormalisasi, dan menjadi dasar bagi Bahasa Indonesia sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting untuk menggali akar-akar sejarah bahasa Indonesia, tetapi juga sangat relevan dalam konteks saat ini, di mana tantangan seperti globalisasi, dominasi bahasa asing, serta upaya revitalisasi bahasa daerah menghadirkan pertanyaan tentang masa depan bahasa nasional. Pemahaman yang mendalam terhadap sejarah bahasa dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan bahasa yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian yang diajukan adalah 1)

Bagaimana Bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca awal di nusantara? 2) Bagaimana bahasa nasional beralih dari Bahasa Melayu ke Bahasa Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan posisi bahasa Melayu sebagai lingua franca serta faktor-faktor yang mendorong penggunaannya; dan menganalisis proses linguistik dan sosial-politik yang mengubah bahasa melayu menjadi bahasa Indonesia. Untuk menjawab masalah di atas, beberapa teori digunakan: 1) Teori Linguistik Historis, yang melihat perkembangan bahasa dari sudut pandang Sejarah (Candria, 2022). 2) Teori sociolinguistik membantu memahami bagaimana bahasa digunakan dalam masyarakat, seperti bilingualisme dan diglossia (Fishman, 1967) (3) Teori Identitas Bahasa menyelidiki hubungan antara bahasa dan identitas kelompok, terutama bagaimana bahasa dapat berfungsi sebagai indikator identitas nasional (Ahmadi et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, transformasi bahasa Melayu ke dalam bentuk Bahasa Indonesia dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Ananta et al., 2023). Pilihan metodologis tersebut dianggap tepat sebab berfokus pada penelusuran secara mendalam terhadap dinamika historis melalui telaah terhadap teks, dokumen akademik, serta arsip-arsip sejarah. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yakni strategi yang berfokus pada

pencarian sekaligus pengumpulan sumber primer maupun sekunder berupa buku-buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, arsip dokumen, serta berbagai karya akademik terkait perkembangan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, peneliti memperoleh data dalam bentuk teks yang siap dianalisis tanpa harus melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Data yang terkumpul dianalisis dengan penerapan analisis isi dan analisis kronologi historis sebagai teknik pengolahan datanya (Rustamana et al., 2024).

Analisis Isi (Content Analysis) difungsikan untuk menyingkap simbol-simbol, ide-ide, serta narasi yang terkandung dalam literatur maupun dokumen historis. Sementara itu, Analisis Kronologi Historis dimanfaatkan untuk menyusun secara berurutan berbagai peristiwa linguistik berdasarkan bukti sejarah. Adapun prosedur penelitian dijalankan melalui langkah operasional berikut: (1) Heuristik, meliputi penentuan topik sekaligus pengumpulan dokumen sejarah dan literatur yang relevan, baik berupa jurnal, buku, arsip pemerintah, maupun dokumen media; (2) Kritik Sumber, yakni tahap evaluasi autentisitas sumber primer maupun sekunder dengan melakukan kritik eksternal dan internal untuk menjaring data yang sah (3) Interpretasi dan Analisis, yaitu mengaitkan bukti sejarah dengan teori linguistik serta sociolinguistik guna menyingkap tema sentral dan pola evolusi bahasa; serta (4)

Historiografi, yang berupa penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi sistematis, koheren, dan mencerminkan rekonstruksi perkembangan bahasa secara kronologis.

PEMBAHASAN

Bahasa Melayu Berfungsi Sebagai *Lingua Franca* Awal di Nusantara

Bukti Historis Penggunaan Melayu Kuno

Sejak abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya telah menggunakan Bahasa Melayu Kuno dalam dokumen resmi, sebagaimana tampak pada sejumlah prasasti penting seperti Kedukan Bukit (683 M), Talang Tuwo (684 M), Kota Kapur (686 M), dan Karang Brahi (688 M). Prasasti-prasasti tersebut ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Melayu Kuno, menandakan kedudukan bahasa ini sebagai *lingua franca* dalam bidang politik maupun keagamaan di kawasan Nusantara. Letak strategis Sriwijaya di jalur Selat Malaka turut menjadikan Bahasa Melayu pasaran sebagai sarana komunikasi utama bagi para pedagang yang datang dari India, Tiongkok, Arab, hingga Eropa. Bahasa ini tidak hanya berfungsi dalam aktivitas perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, tetapi juga berperan sebagai medium diplomasi antar kerajaan dan sebagai wahana pertukaran budaya lintas etnis.

Perkembangan Bahasa Melayu kemudian melahirkan dua ragam utama. Pertama, Melayu Pasar, yaitu varian kolokial yang sederhana, mudah dipelajari,

dan digunakan secara luas dalam interaksi lintas etnis. Kedua, Melayu Tinggi atau Melayu Klasik, yakni ragam standar yang berkembang di lingkungan istana serta dipakai dalam karya sastra dan teks keagamaan, seperti terlihat dalam karya Raja Ali Haji maupun naskah penting kerajaan Melayu, misalnya *Sejarah Melayu* dan *Gurindam Dua Belas*.

Memasuki abad ke-13 hingga 14, kedatangan Islam membawa perubahan signifikan: Bahasa Melayu mulai dituliskan dengan aksara Arab-Melayu (Jawi). Penggunaan aksara Jawi mempercepat penyebaran ajaran agama, hukum Islam, serta sistem administrasi di berbagai Kesultanan Melayu (Intronesia). Stabilitas dan keberlanjutan penggunaan bahasa ini dapat dilacak melalui banyak manuskrip Melayu Klasik yang ditulis dengan huruf Jawi.

Pada abad ke-19, terjadi transformasi penting yang mengarahkan Bahasa Melayu menuju bentuk yang lebih baku. Penerbitan surat kabar berbahasa Melayu serta lahirnya kamus *Kitab Pengetahuan Bahasa* karya Raja Ali Haji menetapkan varian Melayu Riau sebagai standar bagi kepentingan administratif maupun akademis. Tidak lama kemudian, pemerintah kolonial Belanda turut mengadopsi Melayu Riau sebagai bahasa pengantar pendidikan dasar dan media korespondensi bagi pegawai pribumi. Kebijakan ini menjadi tonggak awal dalam proses pembakuan Bahasa Melayu, yang

pada akhirnya membuka jalan bagi perumusan Bahasa Indonesia modern.

Peran Pelabuhan dan Jaringan Perdagangan dalam Penyebaran

Kawasan perairan Selat Malaka beserta pelabuhan-pelabuhan utama seperti Malaka, Ternate, Banda, serta wilayah pesisir Jawa dan Sulawesi berfungsi sebagai simpul penting dalam arus perdagangan internasional. Fungsi pelabuhan pada masa itu tidak hanya sebatas tempat keluar-masuknya komoditas dagang, tetapi juga menjadi ruang interaksi antar-etnis. Para pedagang dari India, Tiongkok, Arab, maupun Nusantara dipaksa oleh kebutuhan komunikasi untuk menggunakan Bahasa Melayu, mengingat penduduk setempat secara dominan mempraktikkan ragam Melayu pasar.

Sebagai ilustrasi, pelabuhan Hitu di kawasan Maluku menunjukkan bahwa sejak abad ke-15, ragam Melayu Riau-Johor telah digunakan baik oleh komunitas lokal maupun pedagang asing. Fakta ini terekam dalam *Hikayat Tanah Hitu* yang ditulis oleh Ridjali dalam Bahasa Melayu. Bahasa Melayu dalam konteks tersebut berkembang menjadi bentuk pidgin atau bahasa perdagangan ringan yang lebih dikenal dengan sebutan “Melayu Pasar” atau *Bazaar Malay*. Ragam ini bersifat sederhana, fleksibel, serta mudah dipahami sehingga mampu menjembatani komunikasi antara pedagang dengan latar bahasa yang beragam, menjadikannya

sebagai sarana utama dalam transaksi lintas budaya di pelabuhan-pelabuhan Nusantara.

Selain berperan dalam perdagangan, Bahasa Melayu juga dijadikan instrumen diplomasi budaya oleh kesultanan-kesultanan Islam, seperti Malaka, Aceh, dan Johor. Melalui strategi *soft power*, penyebaran ajaran Islam dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Melayu. Ulama terkenal, seperti Hamzah Fansuri, menuliskan karya-karya keagamaan dalam bahasa ini sekaligus memperkenalkan aksara Jawi sebagai sistem tulisan resmi dalam administrasi maupun komunikasi diplomatik di pusat-pusat pelabuhan Islam.

Karakteristik Linguistik Bahasa Melayu Klasik

Bahasa Melayu Klasik ditandai oleh konstruksi kalimat yang cenderung panjang, berliku, serta sarat pengulangan (repetisi), sebagaimana lazim ditemukan dalam naskah istana dan karya sastra seperti *Sulalatus Salatin* maupun *Hikayat Inderaputera*. Penggunaan struktur kalimat kompleks dengan pola repetitif berfungsi untuk memberikan sentuhan retorik yang indah sekaligus mempertegas nuansa dramatik dalam narasi. Partikel-partikel seperti *maka*, *adapun*, *hatta*, serta bentuk pasif dengan awalan seperti *diperbuat oleh* menjadi ciri dominan dalam gaya penulisan tersebut.

Berakar pada pengaruh bahasa Arab serta tradisi budaya istana, ragam klasik ini menonjol melalui frekuensi pemakaian

konstruksi pasif, kosakata berregister tinggi, serta istilah-istilah istana semisal *beta*, *titah*, *sembah*, maupun ekspresi kultural seperti *ratna mutu manikam* dan *sahaya*. Kekayaan leksikon Melayu Klasik juga tercermin dalam banyaknya serapan dari bahasa Sanskerta misalnya *raja*, *sahaya*, *manikam* dan bahasa Arab, seperti *Allah*, *nabi*, *khalifah*, *syarat*, *zakat*. Proses Islamisasi turut memperkenalkan fonem baru, antara lain *kh*, *sy*, *dh*, dan *th*, yang akhirnya terakomodasi dalam tradisi lisan maupun dalam sistem tulisan Jawi dan Kawi.

Sebagai bahasa yang bersifat aglutinatif, Melayu Klasik memiliki sistem morfologi dengan imbuhan yang amat beragam, salah satunya imbuhan *se-* yang menampilkan berbagai fungsi semantik sekaligus nuansa makna yang terus mengalami kesinambungan dan inovasi lintas periode. Temuan penelitian Mohamad & Abd. Wahab menegaskan bahwa imbuhan *se-* tidak hanya berperan signifikan dalam fase klasik, tetapi juga memperlihatkan transformasinya dalam ragam Melayu Modern (Mohamad hakim Mohamad & Kartini Abd. Wahab, 2024). Penulisan Jawi (Arab-Melayu) menjadi standar ortografi utama selama periode Melayu Klasik. Batu Bersurat Terengganu (1303 M) misalnya, memperlihatkan penggunaan sistem ejaan Jawi dengan ciri khas tertentu, seperti kata pangkal ayat dan bentuk imbuhan *ni-* serta *mar-* yang menandai konstruksi pasif maupun aktif. Inskripsi ini dipandang sebagai salah satu

penanda awal yang membedakan fase Melayu Klasik dari periode sebelumnya, yakni Melayu Kuno (Abdullah & Abdul Aziz, 2020)

Kebijakan Kolonial terhadap Bahasa Melayu

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, otoritas kolonial menetapkan Bahasa Melayu dengan dialek Johor–Riau sebagai bahasa resmi untuk administrasi serta komunikasi formal dengan masyarakat pribumi. Kebijakan ini dikukuhkan melalui *Peraturan Pendidikan Dasar Pribumi* tahun 1872 yang menyatakan: “*Untuk pendidikan dalam bahasa rakyat, dipakai bahasa yang paling murni ucapannya ... bahasa Melayu akan diajarkan menurut aturan dan ejaan Melayu murni yang dipergunakan di Semenanjung Melaka dan Kepulauan Riau*”. Pilihan tersebut lebih didorong oleh alasan pragmatis: bahasa Belanda dianggap terlalu elitis dan sulit dijangkau oleh kalangan bumiputra, sedangkan Bahasa Melayu telah meluas penggunaannya lintas etnis dan wilayah.

Sebagai upaya standardisasi, pemerintah kolonial pada tahun 1901 memperkenalkan sistem ejaan Van Ophuijsen, hasil karya C.A. van Ophuijsen bersama Muhammad Ta’ib dan Engku Nawawi. Produk utama dari kerja sama ini antara lain *Kitab Logat Melajoe* (1901) dan *Maleische Spraakkunst* (1910), yang dijadikan acuan resmi tata bahasa dan ejaan Melayu. Sejak 1902, aturan ini

diberlakukan di seluruh sekolah pribumi oleh direktur pendidikan, Abendanon. Ejaan Van Ophuijsen mewajibkan pemakaian huruf Latin dengan kaidah pengucapan yang konsisten, sehingga berhasil menyatukan keragaman dialek Melayu ke dalam bentuk baku yang kemudian menjadi fondasi Bahasa Indonesia modern.

Memasuki abad ke-20, upaya pembakuan semakin diperkuat melalui Komisi Bacaan Sekolah Pribumi (1908) yang kemudian berkembang menjadi Balai Poestaka (1917). Lembaga ini mewajibkan penggunaan Bahasa Melayu standar dalam buku pelajaran dan bacaan rakyat, sementara penerbit swasta pun diarahkan untuk menerapkan sistem ejaan yang sama. Di luar ranah pendidikan, media massa seperti *Neratja*, *Medan Prijaji*, dan *Sinar Hindia* turut memakai Bahasa Melayu sebagai sarana kampanye pendidikan dan penyadaran nasional.

Kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk *politik bahasa non-chauvinistik* karena alih-alih memaksakan penggunaan bahasa Belanda, pemerintah kolonial memilih untuk: menjadikan Bahasa Melayu formal sebagai bahasa pengantar Pendidikan, mempromosikan bahasa Melayu standar sebagai media komunikasi resmi antara aparat kolonial dan masyarakat local, dan mengendalikan wacana sosial-politik melalui media cetak berbahasa Melayu, tanpa menimbulkan perlawanan keras akibat dominasi bahasa Belanda yang terlalu menekan. Kontribusi

Van Ophuijsen dalam membakukan bahasa tidak dapat dilepaskan dari karya-karya Raja Ali Haji dan Haji Ibrahim. Naskah penting seperti *Bustan al-Katibin* (1850) serta *Kitab Pengetahuan Bahasa* (1858) menjadi landasan rujukan yang turut memberi arah bagi kebijakan kebahasaan kolonial pada masa itu.

Penerbitan Media Berbahasa Melayu

Kemunculan surat kabar berbahasa Melayu di Hindia Belanda bermula pada pertengahan abad ke-19 dengan terbitnya *Soerat Kabar Bahasa Melajoe* di Surabaya (Januari 1856) serta *Bintang Oetara* di Padang (Februari 1856). Media ini digagas oleh penerbit Belanda maupun komunitas peranakan Tionghoa, ditujukan bagi pembaca pribumi serta kalangan pedagang yang menjadikan Bahasa Melayu sebagai lingua franca di pelabuhan-pelabuhan strategis Nusantara. Tidak lama berselang, *Selompret Melajoe* terbit pada tahun 1860 di Semarang dan mampu bertahan hingga dekade-dekade awal abad ke-20. Walaupun didirikan oleh penerbit Eropa, isinya sarat dengan berita perdagangan, pemerintahan, serta isu sosial, dan menjadikan kaum peranakan Tionghoa serta elite pribumi sebagai sasaran utama pembacanya. Memasuki abad ke-20, sejumlah surat kabar berbahasa Melayu tampil lebih progresif, di antaranya *Medan Prijaji* (1907–1912), *Pewart Deli* (1910–1941), dan *Neratja* (1917–1926). Media-media ini berfungsi sebagai corong kritik terhadap kolonialisme, menyuarakan advokasi

nasionalisme, serta menyoroti ketidakadilan ekonomi maupun politik yang menimpa rakyat bumiputra.

Banyak surat kabar Melayu yang diprakarsai langsung oleh kaum pribumi atau peranakan dengan agenda menuntut hak politik dan akses pendidikan yang lebih adil. Salah satu contohnya adalah *Soenting Melajoe* (Sumatera Barat, 1912–1921), dipimpin oleh Rohana Kudus sebagai surat kabar perempuan pertama di Hindia Belanda. Media ini tidak hanya membicarakan isu nasionalisme, tetapi juga mengusung wacana pemberdayaan perempuan pribumi, dengan menjadikan Bahasa Melayu sebagai medium komunikasi transnasional yang efektif.

Sejak paruh kedua abad ke-19, pemerintah kolonial mulai mendirikan sekolah-sekolah khusus bagi anak-anak pribumi dengan menetapkan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, khususnya sejak 1849–1850. Kebijakan ini diperkuat oleh Gubernur Jenderal Rochussen yang mewajibkan penggunaan Bahasa Melayu, baik sebagai mata pelajaran inti maupun sebagai sarana komunikasi di unit administrasi lokal serta sekolah-sekolah gubernemen. Langkah tersebut mempertegas dominasi Bahasa Melayu dalam ranah birokrasi sekaligus menjadikannya medium komunikasi formal lintas etnis antara pejabat Belanda, kalangan pribumi, maupun komunitas peranakan.

Tidak hanya di sekolah umum, peran Bahasa Melayu juga menguat di

lembaga pendidikan guru seperti *Hollandsch Inlandsche Kweekschool* (HIK) serta sekolah dasar misionaris di Ambon dan Minahasa yang telah berdiri sejak 1834–1852. Lulusan dari sekolah-sekolah tersebut umumnya melanjutkan kiprahnya sebagai tenaga pengajar atau asisten administrasi di sekolah pribumi lainnya, sehingga memperluas jangkauan penggunaan Bahasa Melayu dalam pendidikan formal.

Seiring dengan itu, muncul pula media massa berbahasa Melayu pada awal abad ke-20, antara lain *Medan Prijaji*, *Pewartja Deli*, dan *Neratja*. Surat kabar ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai sarana edukasi sosial, politik, dan bahasa. Melalui kontennya, media ini menyebarkan pengetahuan umum, literasi budaya, serta wacana advokasi masyarakat, sekaligus memperkuat penguasaan Bahasa Melayu, baik dalam bentuk *Melayu sekolahan* maupun *Melayu pasar*.

Hubungan timbal balik antara pendidikan formal dan pers berbahasa Melayu menciptakan efek sinergis: sekolah mengajarkan ragam standar bahasa, sedangkan media massa memperluas praktik penggunaannya dalam kehidupan nyata. Akibatnya, Bahasa Melayu tidak hanya berfungsi sebagai bahasa administrasi, tetapi juga menjadi sarana komunikasi yang mempersatukan berbagai komunitas, termasuk peranakan Tionghoa maupun elite pribumi.

Kebijakan pendidikan kolonial yang berpihak pada penggunaan Bahasa Melayu serta penguatan peran media berbahasa Melayu menghasilkan generasi lulusan yang fasih menggunakan bahasa ini di berbagai ranah kehidupan. Situasi tersebut membuka jalan bagi perumusan serta kodifikasi Bahasa Indonesia setelah Sumpah Pemuda 1928. Selanjutnya, institusi Balai Pustaka melanjutkan penyebaran bahasa melalui literatur edukatif yang turut membentuk materi kurikulum nasional.

Bahasa Nasional Beralih dari Bahasa Melayu ke Bahasa Indonesia

Konteks Historis Sumpah Pemuda 1928

Kongres Pemuda Kedua yang berlangsung pada 27–28 Oktober 1928 di Jakarta menjadi momen puncak penguatan semangat persatuan di kalangan generasi muda. Perhelatan ini diikuti oleh berbagai organisasi kepemudaan seperti *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Islamieten Bond*, hingga *Persatuan Pelajar Indonesia* (PPPI). Sebelumnya, *Kongres Pemuda Pertama* yang diselenggarakan pada 30 April–2 Mei 1926 telah menanamkan embrio gagasan mengenai kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa, meskipun saat itu belum dirumuskan secara formal sebagaimana yang terjadi dalam Kongres Kedua (Woring, 2022).

Tujuan pokok dari Kongres Pemuda II adalah menyatukan keragaman aspirasi etnis ke dalam sebuah kesadaran kebangsaan yang tunggal. Dalam kondisi

kolonialisme yang mengekang, para pemuda memahami bahwa bahasa yang bersifat egaliter dan tidak eksklusif menjadi instrumen fundamental untuk menumbuhkan identitas nasional yang inklusif sekaligus menembus batas kesukuan.

Hasil dari kongres tersebut dirumuskan dalam *Sumpah Pemuda* yang berisi tiga ikrar: “Satu Tanah Air, satu Bangsa, dan satu Bahasa Persatuan: Bahasa Indonesia.” Pada mulanya, istilah “bahasa persatoean” dimaksudkan untuk menyebut Bahasa Melayu. Namun, Mohammad Tabrani kemudian mengusulkan agar terminologi tersebut diganti dengan “bahasa Indonesia,” sehingga bahasa itu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional yang lebih luas. Peristiwa ini memberikan legitimasi politis sekaligus simbolis bagi kedudukan Bahasa Indonesia, yang lahir dari kesadaran kolektif generasi muda dan bukan semata hasil keputusan otoritas dari atas.

Konteks Sosial-Politik dan Historis

Dinamika pergerakan nasional pada periode tersebut sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik Hindia Belanda, yang turut dipengaruhi oleh persaingan kekuatan global pasca-Perang Dunia I. Kondisi itu melahirkan ruang bagi bangkitnya organisasi-organisasi kepemudaan yang berorientasi pada pencerdasan masyarakat serta perubahan sosial. Dalam konteks ini, pilihan terhadap Bahasa Melayu sebagai

dasar persatuan intelektual dianggap lebih tepat dibandingkan dengan Bahasa Jawa atau Sunda, sebab kedua bahasa tersebut sarat dengan stratifikasi sosial dan nuansa eksklusivitas etno-kultural yang dinilai kurang inklusif.

Pada tataran ideologis, Sumpah Pemuda mencerminkan pergeseran paradigma dari identitas berbasis agama atau etnis menuju konsep kebangsaan modern yang lebih inklusif. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *civic nationalism* yang mengedepankan semangat persatuan dalam keberagaman, sejalan dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*.

Deklarasi Sumpah Pemuda inilah yang menjadi landasan resmi kelahiran Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang kemudian diformalkan kedudukannya dalam UUD 1945 serta diperkuat melalui kebijakan pendidikan dan peran media nasional. Partisipasi organisasi kepemudaan lintas etnis baik yang berasal dari komunitas Tionghoa, Arab, maupun pribumi turut mempercepat penyebaran nilai kebangsaan dan bahasa persatuan tersebut. Dukungan media seperti *Sin Po* serta kontribusi tokoh-tokoh penting, antara lain AR Baswedan dan Kwee Thiam Hong, memberikan legitimasi sekaligus memperluas jangkauan pengaruh bahasa persatuan di kalangan masyarakat luas.

Deklarasi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan

Dalam forum *Kongres Pemuda II* pada 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia yang

berasal dari beragam organisasi lintas etnis seperti *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Islamieten Bond*, dan lain-lain secara resmi mengusung gagasan tentang Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Ikrar yang dideklarasikan berbunyi: "*Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung Bahasa Persatuan: Bahasa Indonesia.*" Pergantian istilah dari "Bahasa Melayu" menjadi "Bahasa Indonesia" dipandang sebagai langkah simbolis yang menegaskan representasi identitas kebangsaan baru, yang bersifat kolektif dan melampaui sekat-sekat etnis tertentu (Bulan, 2019) ; (Antari Swandewi, 2019). Deklarasi tersebut menegaskan bahwa Bahasa Indonesia lahir dari kesepakatan bersama, bukan melalui keputusan formal legislatif. Pemilihan bahasa ini dipandang lebih inklusif dan egaliter dalam ruang sosial multietnis, berbeda dengan Bahasa Jawa atau Sunda yang sarat dengan stratifikasi sosial sehingga kurang sesuai dengan agenda nasionalisme. Momentum Sumpah Pemuda sekaligus memberikan legitimasi simbolis bagi Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Sejak itu, bahasa ini mulai diintegrasikan dalam pendidikan, pers, serta wacana politik, sehingga fungsinya berkembang melampaui alat komunikasi menjadi instrumen politik identitas yang berperan penting dalam proses pembentukan kesadaran kebangsaan.

Pasca kemerdekaan, deklarasi tersebut dijadikan dasar kebijakan negara: Bahasa Indonesia dicantumkan secara

eksplisit dalam UUD 1945 Pasal 36 sebagai bahasa resmi negara. Perannya diperluas sebagai bahasa pengantar pendidikan, bahasa dokumen hukum nasional, serta media komunikasi resmi baik di lingkup pemerintahan maupun masyarakat umum. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan historis dari deklarasi tahun 1928 hingga pengukuhan secara konstitusional pada era kemerdekaan (Maghfiroh, 2022).

Aspek Ideologis dan Simbolis Bahasa

Bahasa Indonesia tidak hanya dipahami sebagai sarana komunikasi, melainkan juga sebagai simbol ideologis yang merepresentasikan gagasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar negara. Pada momentum historis *Sumpah Pemuda*, bahasa dipilih sebagai unsur simbolik utama yang memperkuat identitas nasional dengan merumuskan cita-cita “satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa”. Melalui penggunaan Bahasa Indonesia, para pemuda berhasil melebur sekat etnis yang beragam ke dalam identitas kolektif yang inklusif, sekaligus menggantikan orientasi identitas yang sebelumnya berbasis etnik. Dalam konteks ini, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai instrumen politik-ideologis yang menopang penguatan Pancasila sebagai fondasi negara.

Penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan juga merupakan bentuk perlawanan simbolik terhadap dominasi bahasa kolonial maupun bahasa

etnis mayoritas. Kehadirannya menjadi tanda resistensi terhadap stratifikasi sosial kolonial yang mengkotakkan elit, pribumi, dan buruh dengan bahasa yang berbeda. Dengan mengangkat varian Melayu sederhana dan mentransformasikannya menjadi Bahasa Indonesia, para pemuda pada masa itu secara langsung menegaskan kedaulatan linguistik sebagai bagian dari perjuangan menentang struktur kolonial (Sapirah et al., 2024).

Di era globalisasi dan digitalisasi, Bahasa Indonesia semakin diteguhkan sebagai simbol nasional yang merefleksikan identitas bangsa. Penelitian dalam *Jurnal Pendidikan Transformatif* menegaskan bahwa bahasa ini berfungsi sebagai medium transmisi nilai-nilai kebangsaan sekaligus instrumen untuk menjaga komitmen ideologis terhadap Pancasila dan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, meskipun dihadapkan pada tantangan penetrasi bahasa asing serta dominasi budaya populer global (Alyazka et al., 2025).

Kodifikasi dan Modernisasi Bahasa Indonesia

Pasca Proklamasi Kemerdekaan, Republik Indonesia segera mengambil langkah strategis dalam proses kodifikasi bahasa. Konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 36, secara tegas menyatakan bahwa “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”, sehingga memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi penggunaannya dalam ranah administrasi pemerintahan, pendidikan,

maupun sistem hukum nasional (Imsakia Tahir et al., 2025)

Upaya pembakuan bahasa kemudian dipelopori oleh tokoh-tokoh penting, salah satunya ahli linguistik Anton Moeliono. Ia berperan besar dalam merumuskan tata bahasa baku dan penciptaan terminologi baru. Karya-karyanya, seperti *Edjaan Baru Bahasa Indonesia* (1967) dan *Bahasa Indonesia dan Pembakuannya* (1969), menjadi tonggak awal dalam kodifikasi bahasa secara formal setelah kemerdekaan. Selanjutnya, pada tahun 1972 dilakukan reformasi ejaan melalui kerja sama antara Indonesia dan Malaysia yang melahirkan *Ejaan yang Disempurnakan* (EYD), sebagai revisi dari sistem ejaan Van Ophuijsen. Reformasi ini menghadirkan konsistensi penulisan di tingkat nasional sekaligus mempertegas identitas Bahasa Indonesia modern. Pembaruan terus dilakukan, di antaranya melalui *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* (PUEBI) yang diperkenalkan pada 31 Juli 2009 dan diperbaharui kembali pada 26 November 2015, dengan tujuan menyesuaikan kaidah penulisan terhadap perkembangan linguistik serta kebutuhan pendidikan bahasa di era teknologi.

Penerbitan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) edisi pertama pada tahun 1988 menjadi tonggak signifikan dalam pengembangan kosakata baku dan penetapan pedoman resmi penulisan. Hingga edisi keenam yang diluncurkan secara daring pada Oktober 2023, jumlah

entri kosakata telah melampaui 120.000 istilah, dan ditargetkan mencapai sekitar 200.000 istilah pada akhir 2024, menunjukkan konsistensi upaya sistematis dalam memperkuat standar bahasa nasional (Imsakia Tahir et al., 2025). Namun, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru. Fenomena *code-switching* (alih kode), *code-mixing* (campur kode), serta penetrasi bahasa asing terutama bahasa Inggris semakin memengaruhi komunikasi sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial mempercepat penyebaran ragam bahasa nonformal seperti *bahasa gaul* dan *alay*. Walau kerap dipandang mengganggu konsistensi bahasa baku, fenomena ini sekaligus membuka peluang untuk kajian linguistik kontemporer. Selain itu, muncul pula fenomena yang disebut *kramanisation*, yaitu terbentuknya lapisan bahasa formal dan informal dalam Bahasa Indonesia modern. Gejala ini menandakan adanya pengaruh budaya Jawa yang cukup dominan dalam pembentukan stratifikasi sosial-budaya bahasa nasional.

Peran Lembaga Bahasa dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (selanjutnya disebut *Pusat Bahasa*) secara resmi berdiri pada 1 April 1975 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/0/1975, sebagai kelanjutan dari Lembaga Bahasa Nasional. Lembaga ini ditempatkan langsung di

bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan mandat utama untuk menyelenggarakan pembinaan, penelitian, serta pengembangan bahasa dan sastra Indonesia maupun daerah. Tugas pokok Pusat Bahasa meliputi beberapa aspek strategis, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebahasaan dan kesastraan nasional.
2. Pelaksanaan penelitian linguistik dan sastra, pembakuan bahasa, serta penyusunan kamus dan pedoman istilah.
3. Penyediaan layanan penyuluhan bahasa kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk siaran TVRI dan RRI, konsultasi via telepon, serta seminar tatap muka.

Pada periode 1975 hingga 1990-an, Pusat Bahasa aktif menyebarluaskan penyuluhan dengan beragam kanal, antara lain:

1. Program siaran reguler di TVRI dan RRI.
2. Layanan konsultasi kebahasaan melalui surat dan telepon dengan jumlah ratusan aduan tiap tahun.
3. Penyelenggaraan seminar serta kegiatan pendidikan langsung yang melibatkan masyarakat umum, instansi pemerintah, maupun sektor swasta.

Di bawah Pusat Bahasa terdapat tiga unit teknis regional, yakni *Balai Penelitian Bahasa* di Yogyakarta, Denpasar, dan Ujung Pandang. Balai-balai ini memiliki fungsi utama melakukan penelitian terhadap bahasa daerah dan sastra lokal sekaligus bertugas sebagai pusat

dokumentasi kebahasaan di wilayah masing-masing.

Dalam bidang publikasi, Pusat Bahasa menerbitkan sejumlah media ilmiah seperti majalah *Bahasa dan Sastra*, *Lembar Komunikasi*, dan *Informasi Pustaka Kebahasaan*. Selain itu, lembaga ini menjadi penyelenggara *Kongres Bahasa Indonesia* secara berkala (misalnya tahun 1975 dan 1988), yang menghasilkan capaian monumental, antara lain penerbitan perdana *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) serta peluncuran *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*.

Bahasa Indonesia dalam Kebijakan Pendidikan dan Media

Setelah Indonesia merdeka, Bahasa Indonesia secara sistematis diintegrasikan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 31 serta diperkuat melalui Undang-Undang Pendidikan yang disahkan kemudian. Kurikulum-kurikulum awal, seperti *Rencana Pelajaran 1952*, *Rencana Pelajaran 1964*, dan *Kurikulum 1968*, secara eksplisit menempatkan Bahasa Indonesia sebagai instrumen pembentukan karakter sekaligus peneguhan identitas bangsa.

Pada masa Orde Baru, kebijakan wajib belajar sembilan tahun semakin memperkuat pemakaian Bahasa Indonesia di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum pada era ini dirancang untuk memastikan bahwa

penguasaan bahasa Indonesia tidak hanya sebatas keterampilan linguistik, tetapi juga menjadi sarana literasi sekaligus alat pemersatu bangsa dalam kerangka integrasi nasional. Selain di ranah pendidikan, media cetak dan elektronik sejak awal kemerdekaan telah aktif menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Surat kabar, majalah, siaran radio, maupun televisi secara konsisten menyajikan konten dalam bahasa baku, termasuk dalam pemberitaan mengenai proklamasi kemerdekaan, pidato kenegaraan, serta program pemerintah. Praktik ini memperkuat legitimasi penggunaan Bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan teknologi kemudian memperluas jangkauan bahasa ini melalui media pendidikan digital. Kehadiran buku teks interaktif, aplikasi pembelajaran Bahasa Indonesia, serta media sosial terbukti mendukung penyebaran ragam baku sekaligus meningkatkan kompetensi siswa. Studi berbasis tinjauan pustaka menunjukkan bahwa integrasi media digital dalam pembelajaran Bahasa Indonesia mampu memperkuat efektivitas penguasaan bahasa di kalangan peserta didik.

Dengan dukungan kebijakan pendidikan dan media, Bahasa Indonesia diposisikan bukan hanya sebagai sarana komunikasi, melainkan juga sebagai simbol nasionalisme dan penanda identitas budaya. Institusi pendidikan bersama media massa berperan aktif dalam menyosialisasikan ragam baku bahasa ini, baik melalui teks

akademik, siaran resmi pemerintahan, maupun produk budaya populer. Literatur akademik menegaskan bahwa peran ganda ini menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bagian integral dari proses integrasi sosial sekaligus pendidikan kebangsaan.

Pengaruh Globalisasi dan Teknologi

Arus globalisasi yang dipacu oleh perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh besar terhadap praktik penggunaan Bahasa Indonesia. Sebuah penelitian dalam *Jurnal Morfologi* (Universitas Negeri Medan) mengungkap bahwa literasi digital berimplikasi langsung terhadap kemampuan membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia. Melalui media sosial, platform digital, serta sistem pembelajaran daring (*e-learn*), masyarakat kini memiliki akses luas terhadap beragam teks. Namun, kondisi ini sekaligus menghadirkan tantangan dalam menjaga konsistensi bahasa baku, terutama di tengah maraknya ragam informal, serapan istilah asing, serta fenomena *code-mixing*. Studi tersebut menegaskan bahwa literasi digital mampu mendorong motivasi sekaligus meningkatkan keterampilan berbahasa, tetapi tetap diperlukan regulasi dan pedoman ketat agar standar kebahasaan nasional tidak mengalami degradasi (Handika Simamora et al., 2023).

Temuan serupa disampaikan dalam *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa, dan Budaya* edisi Mei 2025. Salsabila dkk. menyoroti efektivitas penggunaan media digital interaktif—

seperti aplikasi *Kahoot*, *Google Classroom*, serta platform pembelajaran lokal—dalam meningkatkan minat siswa Sekolah Dasar untuk mempelajari Bahasa Indonesia. Teknologi edukatif berbasis digital terbukti mampu memperkuat keterampilan berbahasa sekaligus meningkatkan motivasi belajar di era modern.

Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan Sugeng Riadi di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka juga menekankan peran literasi digital dalam pembelajaran jarak jauh Bahasa Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mereka mendokumentasikan praktik penggunaan media video, grup percakapan daring, serta materi digital dalam mendukung keterampilan berbahasa. Hasil studi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan keempat keterampilan utama menyimak, berbicara, membaca, dan menulis khususnya melalui media inovatif seperti *podcast* dan platform literasi digital *Wattpad* ((Lubaba & Alfiansyah, 2022) Lebih lanjut, digitalisasi literasi sastra melalui medium *podcast* maupun *Wattpad* menjadi strategi kontemporer dalam memperkenalkan Bahasa Indonesia kepada generasi muda. Riset yang dilakukan oleh Risma et al. (Universitas Negeri Makassar) menunjukkan bahwa literasi digital berbasis karya sastra memperkuat minat baca, pemahaman terhadap teks, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, media ini juga meningkatkan kepekaan siswa dalam memahami struktur

teks dan memperluas apresiasi terhadap Bahasa Indonesia sebagai sarana ekspresi intelektual dan budaya.

Persaingan dengan Bahasa Daerah dan Bahasa Asing

Hasil penelitian sosiolinguistik di Kabupaten Kampar, Riau, memperlihatkan terjadinya pergeseran penggunaan bahasa, di mana generasi muda semakin meninggalkan bahasa daerah (Melayu Kampar) dan beralih ke Bahasa Indonesia. Pergeseran ini dipicu oleh dominasi Bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan serta media massa, sementara ruang informal yang biasanya menjadi arena pemakaian bahasa lokal kian menyempit. Studi tersebut, yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi nasional, juga mencatat fenomena *code-switching* serta hilangnya kosakata tradisional dalam interaksi sehari-hari.

Fenomena serupa dialami oleh banyak bahasa daerah lain yang kini menghadapi ancaman keberlangsungan akibat penetrasi Bahasa Indonesia. Baiq Yulia K. Wahidah (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa bahasa Sasak di Lombok semakin berkurang penuturnya. Faktor utama penyebabnya adalah tekanan sosial, sistem pendidikan yang berorientasi pada bahasa nasional, serta minimnya insentif dalam penggunaan bahasa lokal, baik di ranah formal maupun dalam aktivitas ekonomi lokal. Di sisi lain, arus globalisasi memicu derasny arus kosakata asing, terutama bahasa Inggris,

masuk ke dalam Bahasa Indonesia. Fenomena ini paling nyata terlihat dalam media sosial, lingkungan pendidikan tinggi, serta sektor profesional. Penelitian Rifqi Zamzami dkk. (2022–2024) menyoroti bahwa istilah-istilah teknis berbahasa Inggris sering digunakan tanpa proses penyerapan sesuai kaidah, sehingga menimbulkan fenomena “pencemaran bahasa” (*language pollution*) yang berimplikasi pada sulitnya menjaga konsistensi standar kebahasaan nasional (Rahmawati et al., 2024)

Resiliensi Bahasa Indonesia sebagai Simbol Nasionalisme

Bahasa Indonesia terus bertahan sebagai simbol nasionalisme meskipun dihadapkan pada derasnya arus globalisasi dan semakin kuatnya pengaruh bahasa asing. Penelitian yang dilakukan oleh Lumban Gaol dkk. (2022) menunjukkan bahwa kendati budaya populer dan media sosial sarat dengan unsur bahasa asing, Bahasa Indonesia tetap berfungsi sebagai perekat identitas nasional, terutama dalam ranah pendidikan, hukum, dan administrasi pemerintahan. Temuan Tanujaya et al. (2025) menegaskan peran generasi muda sebagai agen utama dalam mempertahankan eksistensi Bahasa Indonesia. Melalui pemakaian di media sosial maupun dalam forum akademik, para pemuda secara sadar menjadikan bahasa nasional sebagai simbol kebanggaan kolektif sekaligus instrumen pemersatu bangsa. Sementara itu, penelitian oleh AlyAzka et al. (2025) menguraikan

bagaimana Bahasa Indonesia berfungsi sebagai media penguatan identitas budaya di era global. Upaya pelestarian ini dilakukan melalui jalur pendidikan, kolaborasi lintas sektor, hingga digitalisasi konten lokal yang secara konsisten mempertegas posisi Bahasa Indonesia sebagai simbol kebangsaan yang tahan terhadap penetrasi budaya asing. Pandangan serupa diungkapkan oleh Diah Kusyani, yang menekankan bahwa strategi pembinaan dan pengembangan bahasa, khususnya dalam menghadapi banjir istilah asing, dilakukan melalui pendidikan formal, peran media, serta literasi digital. Menurutnya, langkah-langkah ini merupakan wujud nyata pelestarian simbolik Bahasa Indonesia di tengah era *Society 5.0* (Kusyani, 2022).

SIMPULAN DAN SARAN

Bahasa Indonesia merupakan buah dari perjalanan sejarah yang panjang serta sarat dinamika. Bertolak dari akar Bahasa Melayu sebagai lingua franca di Nusantara, bahasa ini mengalami transformasi besar hingga akhirnya dikukuhkan sebagai simbol persatuan nasional melalui deklarasi *Sumpah Pemuda* tahun 1928. Proses kodifikasi dan pembakuannya ditandai dengan lahirnya *Ejaan yang Disempurnakan*, penerbitan kamus standar, serta penerapan kebijakan kebahasaan oleh lembaga resmi seperti *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Rangkaian langkah konkret tersebut memperkuat posisi Bahasa Indonesia sebagai bahasa

negara modern yang adaptif. Peranannya semakin nyata karena berhasil menempati posisi sentral dalam dunia pendidikan, media, maupun pemerintahan, sehingga menjadi elemen fundamental dalam pembentukan identitas kebangsaan.

Memasuki era globalisasi dan digitalisasi, Bahasa Indonesia menghadapi tantangan baru berupa penetrasi bahasa asing dan bergesernya peran bahasa daerah. Kendati demikian, daya tahan bahasa ini tetap terjaga berkat dukungan kelembagaan yang konsisten serta partisipasi generasi muda yang terus menghidupkan pemakaiannya di ruang digital maupun sosial. Dengan demikian, Bahasa Indonesia tidak hanya sekadar sarana komunikasi, tetapi juga simbol ideologis dan representasi budaya yang menyatukan berbagai etnis serta bahasa lokal di tanah air.

Agar Bahasa Indonesia semakin kokoh dalam konteks global dan era digital, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif. Pertama, literasi digital berbasis Bahasa Indonesia harus diperluas melalui aplikasi pembelajaran maupun platform media sosial yang menekankan penggunaan bahasa baku. Kedua, revitalisasi pemakaian bahasa di ruang publik perlu didorong agar Bahasa Indonesia tampil konsisten dalam iklan, layanan publik, serta komunikasi resmi. Ketiga, pelestarian bahasa daerah perlu dilaksanakan secara sinergis dengan Bahasa Indonesia sehingga keduanya berfungsi saling melengkapi dalam

memperkuat identitas multikultural bangsa. Keempat, kebijakan kebahasaan yang berbasis teknologi harus dirancang agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan komunikasi pada era kecerdasan buatan dan platform daring. Kelima, penguatan peran institusi kebahasaan sekaligus diplomasi linguistik internasional perlu digalakkan untuk menempatkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memiliki pengaruh di tingkat global. Dengan langkah-langkah tersebut, Bahasa Indonesia akan tetap teguh sebagai simbol nasionalisme yang relevan dan berdaya tahan lintas zaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Z., & Abdul Aziz, A. Y. (2020). Penilaian Semula Ciri Bahasa Melayu Klasik Berdasarkan Perbandingan Inskripsi. *E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik (e-JBL)*, 2(2), 18–33. <https://doi.org/10.53840/ejbl.v2i2.47>
- Ahmadi, Y., Yasmadi, Y., & Fitri, T. (2024). Sociolinguistics in the digital era: Minang language as cultural identity. *Leksika: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pengajarannya*, 18(2), 63. <https://doi.org/10.30595/lks.v18i2.22990>
- Aisyah, S. N., & Hartono, R. (2025). Perubahan Makna Kata dalam Bahasa Indonesia: Kajian Semantik Historis. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Sastra*, 1(1972), 33–36.
- Alyazka, A., Iلمان, A., Rahmawan, F., Isnatiar, R., & Jati, T. K. (2025). Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT

-) Peran Bahasa Indonesia dan Keberagaman Budaya dalam Mempertahankan Identitas Nasional di Era Globalisasi Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT). *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 04(02), 38–48.
<https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive%0APeran>
- Ananta, R. D., Anugrah, R. A., Fitriani, R., Rindi, Y., & Herlinda. (2023). *Pahaman dan Penerapan Bahasa Melayu Riau dalam Konteks Bahasa Indonesia: Sebuah Studi Kasus di Kalangan Bilingual*. 25–30.
- Antari Swandewi, L. P. (2019). Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional bangsa Indonesia [Indonesian as the national identity of the Indonesian people]. *Jurnal Jisipol*, 8(November), 17.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3903959>
- Bulan, D. R. (2019). Bahasa Indonesia Sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia. *Jisipol*, 3(2), hlm.23-29.
- Candria, M. (2022). Telaah Linguistik Historis Komparatif Terhadap Bahasa Indonesia, Jawa, Madura, Dan Bali. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(1), 67–75.
- Dewi, A. C., Muchdy, A. J. L., Mael, V. K. S., Sumardi, M. E., Desember, Y. W., & A. Ahmad Nadil. (2023). Peran Bahasa Indonesia dalam Pembentukan Identitas Nasional. *Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa*, 1(1), 1–14.
- Elya Qanita, R., Aulia, K., Nur Azizah, S., Diba Diaswari, F., & Fu, A. (2025). Peran Sumpah Pemuda 1928 dalam Pembentukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, 2(2), 3584–3589.
- Fishman, J. A. (1967). No Title. *Journal of Social Issues*, Vol. 23(Bilingualism With and Without Diglossia; Diglossia With and Without Bilingualism), 29–38.
- Habib F, M. (2017). Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 13(1).
<https://doi.org/10.21831/istoria.v13i1.17613>
- Handika Simamora, Joy Stevani Simangunsong, Sartika Sartika, Larista Larista, Josua panjaitan, & Fitriani Lubis. (2023). Pengaruh Literasi Digital terhadap Keterampilan Membaca dan Menulis Bahasa Indonesia. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 1(6), 158–163.
<https://doi.org/10.61132/morfologi.v1i6.126>
- Hariyawan Nugraha, F., Asyifa Nurulhuda, R., & Aziz Fidinillah, A. (2025). *SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA INFO ARTIKEL ABSTRAK Sejarah Artikel: (Diisi Editor)*. 3(1), 10–14.
- Hermansyah. (2014). Kesultanan Pasai Pencetus Aksara Jawi. *Jumantara*, 5(2), 27–51.
- Imsakia Tahir, Rahma Ashari Hamzah, Lilis Suryani, & Siti Nurhalisa. (2025). Sejarah Perkembangan dan Kedudukan Bahasa Indonesia. *Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan Dan Bahasa*, 3(3), 319–328.
<https://doi.org/10.61132/yudistira.v3i>

- 3.2038
- Juanda, -. (2017). Politik Bahasa Indonesia Dari Prakemerdekaan Dan Pascakemerdekaan. *Jurnal Tuturan*, 4(1), 688. <https://doi.org/10.33603/jt.v4i1.844>
- Kusyani, D. (2022). Pemertahanan Bahasa Indonesia Terhadap Pengaruh Bahasa Asing Pada Era Society 5.0. *Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8(2), 136–142. <https://doi.org/10.47662/pedagogi.v8i2.391>
- Lubaba, M. N., & Alfiansyah, I. (2022). Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi. *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 9(3), 687–706.
- Maghfiroh, N. (2022). Bahasa Indonesia sebagai Alat Komunikasi Masyarakat dalam Kehidupan Sehari-hari. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19(02), 102–107. <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/516>
- Mohamad hakim Mohamad, & Kartini Abd. Wahab. (2024). Spekturm imbuhan se- dalam bahasa Mleayu klasi dan moden: Analisis morfologi diakroknik. *Jurnal Wacana Sarjana*, 8(June), 1–12.
- Nataly, A., Wulandari, A. N., Situmeang, H., & Matanari, S. (2024). Bahasa Indonesia pada Era Kolonial Hingga Reformasi. *Journal on Education*, 6(4), 18711–18720. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5849>
- Nordin, M. (2022). The Intellectual of Johor Community: The Tradition of Literature Across the Ages. *Journal of Al-Tamaddun*, 17(2), 83–98. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no2.7>
- Rahmawati, S., Dwi Maharani Wahyudi, N., Adha Aura, H., Rizky Saputra, F., Alif Khoirul Rijal, M., & Puspa Arum, D. (2024). Dampak Bahasa Asing Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia Di Media Sosial. *Bahasa Dan Ilmu Sastra*, 1(1), 7–13. <https://publish.bakulsosmed.co.id/index.php/BISA>
- Rizkiyani, H., Ketut, N., Dyah, A., Masruroh, S., & Natily, Z. Z. (2025). *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Dampak Xenoglosofilia dan Sumpah Pemuda dalam Transformasi Bahasa Melayu menjadi Bahasa Nasional Indonesia Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*. 04(02), 49–62.
- Rustamana, A., Zahwan, A. H., Hilmani, F., & Selma, A. (2024). Cendika Pendidikan Metode Historis sebagai Pedoman dalam Penyusunan Penelitian Sejarah. *Tahun*, 5(6), 1–10.
- Santoso, G., Muzaqi, A., Raihan, M., & Mahesa, S. F. (2023). Dampak Positif Sumpah Pemuda pada Organisasi Besar di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(02), 194–202.
- Sapirah, Raditya, F., Maharani, Z., Putri, S. F., Silvia, M., Destar, J., & Hermia, D. (2024). Peran dan Fungsi Bahasa Indonesia Dalam Membangun Identitas dan Integrasi Nasional. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(10), 6781–6791. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Sudaryanto. (2018). Dari Sumpah Pemuda (1928) Sampai Kongres Bahasa Indonesia I (1938): Kajian Linguistik Historis Sekitar Masa-

masa Prakemerdekaan. *Kajian
Linguistik Dan Sastra*, 3(2), 100–108.
<http://journals.ums.ac.id/index.php/KLS>

Woring, M. C. (2022). Sumpah Pemuda
Merupakan Cikal Bakal Tercetusnya
Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa
Persatuan 1928-1954 (Suatu Tinjauan
Historis). *Danadyaksa Historica*,
2(1), 22.
<https://doi.org/10.32502/jdh.v2i1.4788>